

TATA KELOLA TERMINAL TIPE A DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA TERMINAL TIPE A ISIMU BPTD WILAYAH XXI PROVINSI GORONTALO)

Nirmala A. Sahi

Email : nimalaathira@gmail.com
Universitas Gorontalo

Dikson Junus

Email : diksonjunus@gmail.com
Universitas Gorontalo

Muten Nuna

Email : mutensnuna@gmail.com
Universitas Gorontalo

Amirudin Paramata

Email : amirudinparamata@gmail.com
Universitas Gorontalo

Abstract

Implementation of the principles of Good Governance, where the state is the party that plays the most important role in realizing these principles. The implementation of Good Governance is the main prerequisite for realizing the aspirations of the community in achieving the goals and aspirations of the nation and the State, this cannot be separated from the application of the principles of good governance at the Isimu BPTD Type A Terminal in Region XXI of Gorontalo Province. This research was conducted to determine the implementation of good governance in the management of the Type A Isimu BPTD Terminal Region XXI Gorontalo Province. This research uses a qualitative descriptive method with an analytical method, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. The results of this research indicate that the implementation of good governance in the governance of the Type A Isimu BPTD Terminal Region XXI Gorontalo Province has not been fully implemented optimally. This can be seen from several indicators, namely: planning that has not been optimal, namely related to track routes and output as the final result, organization that has not been maximized, namely related to the arrangement of bus parking and track routes, implementation of activities that still need to be improved, and supervision that has not been carried out optimally.

The recommendation of this research is that the Land Transportation Management Center Region XXI Gorontalo Province through the Isimu Type A Terminal service unit should: 1) further maximize the terminal work plan, 2) further maximize terminal management, by continuing to improve security, cleanliness and order in the terminal, 3) need to maximize the function of the Terminal, and 4) need to increase supervision over the use of the

terminal and supporting facilities according to their intended purpose, especially vehicle parking areas that are not yet neatly arranged.

Keywords: *Organizing, Good Governance, Governance, Supervision*

Abstrak

Penerapan prinsip *Good Governance*, dimana negara merupakan pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, tak terlepas juga penerapan prinsip *good governance* pada Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *good governance* dalam tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam tata kelola terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu diantaranya: perencanaan yang belum maksimal yaitu terkait rute lintasan dan output sebagai hasil akhir, pengorganisasian yang belum maksimal yaitu terkait penataan parkir bus dan jalur lintasan, pelaksanaan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan, dan pengawasan yang belum optimal dilakukan.

Rekomendasi penelitian ini yaitu Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo melalui satuan pelayanan Terminal Tipe A Isimu seharusnya : 1) lebih memaksimalkan rencana kerja terminal, 2) lebih memaksimalkan lagi tatalaksana terminal, dengan terus meningkatkan keamanan, kebersihan dan ketertiban dalam terminal, 3) perlu memaksimalkan lagi fungsi Terminal, dan 4) perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan terminal dan fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya khususnya tempat parkir kendaraan yang belum tertata rapi.

Kata Kunci : *Pengorganisasian, Good Governance, Tata Kelola, Pengawasan*

Submitted: 12-01-2024 | Accepted: 20-02-2024 | Published: 29-02-2024

1. Pendahuluan

Implementasi prinsip *Good Governance* menempatkan negara sebagai aktor yang paling krusial dalam mewujudkan konsep tersebut. Kehadiran *good governance* menjadi syarat utama untuk mengaktualisasikan harapan masyarakat dalam meraih tujuan dan aspirasi nasional. Agar hal tersebut dapat terlaksana, esensial untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan, dan konkret. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan dapat terjadi dengan efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab, serta terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN). Dalam usaha mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan dalam bidang kelembagaan, tata kelola, dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Meningkatkan profesionalitas ASN sebagai motor pengelolaan negara perlu difokuskan pada aspek pekerjaan, integritas, dan kompetensi agar dapat memberikan layanan publik yang optimal. Pembinaan ASN harus diarahkan untuk mencapai peningkatan kinerja individu dan organisasi, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara efektif. (Napir & Junus, 2019). Sementara itu, kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya mencakup kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. (Nasution, 2008)

Sejak tahun 2005, implementasi perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN ini menetapkan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam perencanaan pembangunan di masa lalu. Beberapa harapan utama dari perubahan ini mencakup pencapaian keterpaduan dan sinergi dalam pembangunan antar daerah, integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam setiap kebijakan publik, partisipasi masyarakat menjadi suatu proses untuk mengungkapkan gagasan dan pendapat mereka. (Sjafrizal, 2016). Untuk mewujudkan "*good governance*" dan menjalankannya dengan efektif, diperlukan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif memerlukan koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Penerapan *good governance* dianggap sebagai kebutuhan mutlak bagi sebagian besar rakyat, untuk menciptakan suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. (Tomuka, 2013)

Berbagai pandangan mencoba merumuskan konsep *good governance*, dan salah satunya berasal dari *Asian Development Bank* yang menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* ditekankan pada empat pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi. Disisi lain, Departemen Dalam Negeri

(DEPDAGRI) dan United Nations Development Program (UNDP) merinci *good governance* ke dalam sepuluh karakteristik. Kesepuluh karakteristik tersebut mencakup aspek kesetaraan, pengawasan, penegakan hukum, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, partisipasi, profesionalisme atau profesionalitas, akuntabilitas, wawasan kedepan, dan transparansi. (Lukow, 2013)

Pada intinya, *good governance* melibatkan pengelolaan negara secara kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan merujuk pada prinsip-prinsip tertentu. Untuk mencapai hubungan yang harmonis antara ketiga pemangku kepentingan tersebut, interaksi di antara mereka harus sejalan dengan peran masing-masing. Pemerintah, sebagai pelaku *good governance*, memiliki fungsi utama sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam konteks sosio-ekonomi dan menciptakan lingkungan politik serta hukum yang mendukung. Disisi lain, sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan melalui produksi barang dan jasa, (Anwar, 2005).

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) menjadi istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru dan digantikan oleh gerakan reformasi. Konsep *good governance* muncul sebagai respons terhadap kinerja pemerintah yang dianggap kurang efektif dalam menjalankan urusan publik, yang selama ini dikelola secara sentralistis dan non-partisipatif. Harapan dari setiap warga negara terhadap tata pemerintahan yang baik mencerminkan keinginan untuk melihat pemerintahan yang berkualitas, yang akan membawa ketertiban dalam kehidupan negara dan mewujudkan *good governance* yang diidamkan. Setiap individu dalam masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai apa yang disebut sebagai *good governance*. Kesejahteraan masyarakat sering dijadikan tolak ukur untuk menilai apakah sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik atau masih belum memadai. (Wibowo, 2004)

Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* menjadi sangat signifikan dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Pemerintah telah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan menciptakan pelayanan publik atau tata pemerintahan yang optimal. Meskipun demikian, ada pandangan di kalangan masyarakat bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi sering dianggap lambat, kurang profesional, dan mahal biaya, Menurut (Santosa, 2008) bahwa prinsip-prinsip tersebut meliputi :

Partisipatif, Rule of Law (penegakan hukum), Transparansi, Responsiveness (daya tanggap), Konsensus, Persamaan Hak, Efektivitas dan Efisiensi, serta Akuntabilitas.

Untuk menjalankan Good Governance secara efektif, dibutuhkan keterlibatan dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kehadiran Good Governance yang berhasil memerlukan koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etika kerja dan moral yang tinggi. Oleh karena itu, menerapkan konsep Good Governance dalam pengelolaan kekuasaan pemerintah negara merupakan sebuah tantangan, termasuk dalam konteks tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, dimana Isimu masuk dalam simpul jalan nasional Trans Sulawesi, akan tetapi dalam pengoperasionalnya, dimana Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo belum bisa dioptimalkan, terutama penetapan lalu lintas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum antar kota antar provinsi/antar kota dalam provinsi sebagai lokasi awal dan lokasi akhir perjalanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Gorontalo. Hal ini dikarenakan, adanya 2 Terminal Tipe A yang ada di Gorontalo yang berdekatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, dimana persyaratan lokasi terminal tipe A yaitu untuk jarak antara dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 KM di pulau Jawa, 30 KM di pulau Sumatera, dan 50 KM di pulau lainnya. Sedangkan jarak antara dua terminal di Provinsi Gorontalo kurang lebih berjarak 28,7 KM, sehingga membuat Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo hanya menjadi terminal transit atau lintasan kendaraan angkutan kota antar provinsi dan juga angkutan kota dalam provinsi. Selain itu, kurangnya kendaraan angkutan antar moda lanjutan bagi penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *good governance* dalam tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo. Dimana, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya tentang penerapan *Good Governance*. Sedangkan secara praktik, dimana penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo, khususnya pengelola terminal Tipe A serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penerapan prinsip *Good Governance*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo, dipilih karena adanya permasalahan terkait tata kelola terminal sebagai sarana transportasi darat. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan kajian lapangan guna mengungkap fakta-fakta yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analitis. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010) menyatakan penelitian kualitatif suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang berasal dari pengalaman dan perilaku orang yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman alamiah secara holistik, menganggap manusia sebagai instrumen penelitian, melakukan analisis data secara induktif, dan memberikan penekanan lebih besar pada proses ketimbang hasil penelitian yang disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Untuk mendukung keperluan data, maka ditunjuk sejumlah informan dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo, meliputi : Koordinator Terminal, Devisi Administrasi, Devisi Bendahara Pengeluaran, Devisi Humas dan TOS, Petugas LLAJ, Petugas Pencatatan dan Load Factor, Petugas Administrasi, serta Petugas Pelayanan dan Informasi. Dari data selanjutnya dilakukan analisis data yaitu mulai dari : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance memegang peranan krusial dalam peningkatan kinerja aparatur negara, terutama dalam konteks pelayanan publik. Konsep Good Governance telah dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan birokrasi guna menciptakan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih memandang bahwa layanan publik yang diselenggarakan birokrasi seringkali berjalan lambat, kurang profesional, dan biayanya tinggi. Keberhasilan Good Governance memerlukan komitmen serta keterlibatan aktif dari pemerintah dan masyarakat. Efektivitas Good Governance menuntut koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etika kerja dan moral yang tinggi.

Penerapan konsep Good Governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di tingkat nasional, termasuk dalam tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI

Provinsi Gorontalo, menjadi sebuah tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap temuan-temuan terkait penerapan Good Governance dalam pengelolaan Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo. Beberapa hasil temuan yang akan dijelaskan antara lain :

Perencanaan Program

Perencanaan pengelolaan terminal mencakup berbagai aspek, antara lain: 1) Penataan pelataran terminal berdasarkan rute atau jurusan, 2) Penataan fasilitas penumpang di terminal, 3) Penataan fasilitas penunjang terminal, 4) Penataan arus lalu lintas di area pengawasan terminal, 5) Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan, 6) Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan, 7) Pengaturan jadwal petugas di terminal, 8) Evaluasi sistem pengoperasian terminal. Semua langkah tersebut merupakan bagian integral dari perencanaan pengelolaan terminal, dengan tujuan menciptakan sistem yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna terminal.

Tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo pada dasarnya telah disusun sesuai rencana yang dibuat oleh pimpinan di atasnya, yaitu mulai dari penataan pelataran terminal sesuai rute tujuan perjalanan, pengaturan jadwal petugas terminal, tarif angkutan, hingga evaluasi dalam pengoperasian terminal dan lain-lain. Tentunya hal ini dilakukan agar Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, meskipun pengoperasasiannya belum optimal berdasarkan perencanaan yang dibuat.

Berkaitan dengan perencanaan program dimana Koordinator Satuan Pelayanan dalam wawancara menjelaskan bahwa :

“Menurut saya, tata kelola terminal sudah dijalankan sesuai dengan perencanaan yang dibuat, akan tetapi untuk hasil yang dicapai belum 100%”. Hal ini dikarenakan dimana dalam pengoperasionalnya, Terminal Tipe A Isimu Wilayah Provinsi Gorontalo belum bisa dioptimalkan secara maksimal, terutama penetapan rute lintasan.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Petugas Pelayanan dan Informasi dalam wawancara juga mengatakan bahwa :

“Menurut pengamatan saya pribadi, sebagai ASN Kementerian Perhubungan, dimana tata kelola Terminal Tipe A Isimu Wilayah Provinsi Gorontalo sudah dijalankan sesuai dengan

perencanaan yang dibuat. Namun hanya kurangnya dihasil akhir dan output yang didapat sehingga kurang adanya apresiasi”.

Hasil penelitian menunjukkan meskipun tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo sudah dijalankan sesuai perencanaan yang dibuat, namun belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kekurangan yang menjadi hambatan dalam menjalankan rencana kerja di Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo yaitu diantaranya penetapan rute lintasan, serta output sebagai hasil akhir, dimana kurang mendapat apresiasi dari masyarakat.

Oleh karena itu menurut analisis peneliti bahwa, demi mewujudkan penerapan *good governance* dalam tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo dimana pihak Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo melalui satuan pelayanan terminal harus lebih memaksimalkan rencana kerja terminal, khususnya jalur pelintasan kendaraan dalam provinsi dan luar provinsi sebagai lokasi awal dan lokasi akhir perjalanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Gorontalo, agar mendapat apresiasi dari masyarakat pengguna layanan itu sendiri.

Pengorganisasian Atau Tata Laksana

Pengorganisasian tata kelola terminal mencakup sejumlah aspek, termasuk: 1) Pemeliharaan kebersihan bangunan dan perbaikannya, 2) Pemeliharaan kebersihan pelataran terminal dan perawatan tanda-tanda serta perkerasan pelataran, 3) Pemeliharaan saluran-saluran air yang ada, 4) Pemeliharaan instalasi listrik dan lampu penerangan, 5) Pemeliharaan alat komunikasi, 6) Penyediaan dan pemeliharaan sistem hydrant atau alat pemadam kebakaran lainnya yang siap pakai, 7) Penertiban calon penumpang yang masuk atau keluar dari daerah kewenangan terminal, 8) Penertiban penggunaan fasilitas penunjang sesuai peruntukannya, 9) Penertiban dari gangguan pedagang asongan, pengemis, calo, dan sebagainya, 10) Penertiban terminal dari gangguan keamanan. Semua langkah ini merupakan bagian dari pengorganisasian dalam upaya menjaga agar terminal berfungsi secara optimal dan aman.

Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo pada dasarnya telah diorganisir dengan baik berdasarkan prosedur yang berlaku, yaitu mulai dari perawatan

fasilitas terminal, penertiban keluar masuk kendaraan hingga penertiban calo maupun pedagang asongan dan lain sebagainya, karena hal ini dapat mengganggu kenyamanan penumpang dan ketertiban arus lintasan yang sedang beroperasi, akan tetapi hal ini masih perlu dioptimalkan lagi, karena masih terdapat juga sejumlah kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya atau jalur lintasan, meskipun para petugas setiap saat mengingatkan kepada para sopir, namun tidak banyak juga yang mengindahkan peringatan dari petugas terminal tersebut.

Berkaitan dengan pengorganisasian atau tata laksana dimana Koordinator Satuan Pelayanan dalam wawancara menjelaskan bahwa :

“Menurut saya, pengorganisasian atau tata laksana Terminal Tipe A Isimu Wilayah Provinsi Gorontalo sudah dijalankan dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga terorganisir dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi terkait penertiban penggunaan fasilitas penunjang sesuai peruntukannya”.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Petugas Administrasi dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Ya, sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Didalam terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo ada kepala koordinator beserta staf yang bertugas, di Terminal Tipe A Isimu juga ada beberapa anggota yang melaksanakan Piket 1 x 24 jam yang bertugas menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban dalam terminal, namun pengorganisasian tata kelola terminal tersebut masih perlu ditingkatkan lagi”.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan meskipun tata kelola Terminal Tipe A Isimu Wilayah Provinsi Gorontalo sudah terorganisir sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik keamanan, kebersihan dan ketertiban dalam terminal, namun hal ini masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih terdapat beberapa permasalahan dilapangan yaitu terkait penertiban penggunaan fasilitas penunjang sesuai peruntukannya termasuk didalamnya belum tertatanya parkir kendaraan sesuai jalur lintasan.

Oleh karena itu menurut analisis peneliti bahwa, demi mewujudkan penerapan *good governance* dalam tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo dimana pihak Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo melalui satuan pelayanan terminal harus tetap lebih memaksimalkan

lagi tatalaksana terminal, dengan terus meningkatkan keamanan, kebersihan dan ketertiban dalam terminal, khususnya pengaturan jalur lintasan kendaraan.

Pelaksanaan Program

Aspek pelaksanaan tata kelola terminal melibatkan beberapa langkah, antara lain:1) Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal, 2) Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 3) Pelaksanaan pemungutan jasa pelayanan di terminal penumpang, 4) Pemberitahuan kepada penumpang mengenai keberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, 5) Pengaturan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal. Semua tindakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola terminal yang bertujuan menjaga kelancaran operasional dan pemberian layanan yang baik.

Tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan prosedur yang berlaku, yaitu mulai pengaturan arus lalu lintas, pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan sampai pemungutan jasa dan lain sebagainya. Tentunya hal ini dilakukan agar Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo dapat beroperasi dengan baik dan maksimal serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dimana Petugas LLAJ dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Untuk tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan standar operasional pelaksanaan yang ditetapkan, namun hal ini perlu peningkatan lagi”.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Devisi Humas dan Tos dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Menurut saya tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan SOP yang berlaku, sehingga para petugas terminal tidak mengalami kebingungan lagi dalam menjalankan tugas yang diemban”.

Hasil penelitian menunjukkan, meskipun tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo sudah dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku,

misalnya pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal dan lain sebagainya, namun hal ini masih perlu ditingkatkan lagi khususnya terkait pengaturan arus lintasan di daerah pengawasan terminal serta memaksimalkan fungsi terminal dengan baik.

Oleh karena itu menurut analisis peneliti bahwa, demi mewujudkan penerapan *good governance* dalam tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo dimana pihak Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo melalui satuan pelayanan terminal harus lebih mengoptimalkan pengaturan arus lintasan di daerah pengawasan terminal serta perlu memaksimalkan lagi fungsi Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo, dimana bukan hanya difungsikan sebagai terminal transit atau lintasan kendaraan angkutan penumpang dan barang antar provinsi dan provinsi, namun sebagai lokasi awal dan lokasi akhir perjalanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Gorontalo.

Pengawasan Terhadap Program

Pemantauan terhadap program dilakukan secara langsung dan mencakup sejumlah aspek, seperti: 1) Pemantauan pelaksanaan tariff, 2) Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan, 3) Pemeriksaan kendaraan secara teliti, khususnya untuk kendaraan yang tidak memenuhi standar keamanan jalan, 4) Pemeriksaan batas kapasitas muatan yang diizinkan, 5) Pemeriksaan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan, 6) Pencatatan dan pelaporan pelanggaran yang terjadi, 7) Pemeriksaan kewajiban pengusaha angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 8) Pemantauan pemanfaatan terminal dan fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya, 9) Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan terminal berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku

Pengawasan terhadap tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo pada prinsipnya telah dijalankan dengan cukup baik berdasarkan prosedur yang berlaku, yaitu mulai dari pemeriksaan batas maksimal muatan, pelaporan pelanggaran, rekapitulasi kendaraan penumpang yang tiba dan berangkat, pemantauan pelaksanaan jadwal perjalanan dan tariff perjalanan hingga pemantauan dalam pemanfaatan fasilitas terminal sesuai peruntukannya. Akan tetapi tingkat pengawasan

tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih terdapat juga sejumlah permasalahan dalam terminal termasuk kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya atau jalur lintasan, karena hal ini dapat mengganggu arus lintasan dalam terminal.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap program dimana Petugas Pencatatan dan Load dalam wawancara menjelaskan bahwa :

“Tingkat pengawasan terhadap tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo masih kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi, karena kendaraan baik roda dua roda empat belum bisa parkir ditempat yang sudah disediakan di area terminal, mereka asal-asalan parkir kendaraan”.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Devisi Bendahara Pengeluaran dalam wawancara juga mengatakan bahwa :

“Pengawasan di dalam Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo perlu ditingkatkan lagi, karena masih banyak kendaraan yang ada di luar area terminal belum mengetahui tempat parkir yang benar, sehingga membuat arus lintasan tidak teratur dengan baik dan benar”.

Penelitian menunjukkan tingkat pengawasan terhadap tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo kurang optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi, yaitu pemantauan pemanfaatan terminal dan fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya khususnya tempat parkir kendaraan yang belum tertata rapi karena kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh para petugas di terminal, sehingga hal ini berdampak juga pada pengaturan arus lintasan kendaraan.

Oleh karena itu menurut analisis peneliti bahwa, demi mewujudkan penerapan *good governance* dalam tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo dimana pihak Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo melalui satuan pelayanan terminal perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan terminal dan fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya khususnya tempat parkir kendaraan yang belum tertata rapi, karena masih banyak kendaraan yang ada di luar area terminal belum mengetahui tempat parkir yang benar, sehingga membuat arus lintasan tidak teratur dengan baik dan benar.

Untuk memastikan bahwa Good Governance dapat berjalan, diperlukan komitmen dan pelibatan dari pemerintah dan masyarakat. Efektivitas Good Governance menuntut koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Oleh karena itu, penerapan konsep Good Governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara, termasuk tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo, merupakan suatu tantangan tersendiri.

4. Kesimpulan

Penerapan *good governance* dalam tata kelola terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo belum optimal diterapkan pada indikator diantaranya: 1). Meskipun tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo sudah dijalankan sesuai perencanaan yang dibuat, namun belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam menjalankan rencana kerja di Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo yaitu diantaranya penetapan rute lintasan, serta output sebagai hasil akhir, dimana kurang mendapat apresiasi dari masyarakat; 2). Meskipun tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo telah terorganisir sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik keamanan, kebersihan dan ketertiban dalam terminal, namun hal ini masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih terdapat beberapa permasalahan dilapangan yaitu terkait penertiban penggunaan fasilitas penunjang sesuai peruntukannya termasuk didalamnya belum tertatanya parkir kendaraan sesuai jalur lintasan; 3). Meskipun tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo sudah dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku, misalnya penataan ruang tunggu penumpang dan lalu lintas kendaraan dalam terminal dan lain sebagainya, namun hal ini masih perlu ditingkatkan lagi khususnya terkait pengaturan arus lintasan di daerah pengawasan terminal serta memaksimalkan fungsi terminal dengan baik; dan 4). Tingkat pengawasan terhadap tata kelola Terminal Tipe A Isimu BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo kurang optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi. Pemantauan fasilitas terminal belum sesuai dengan penggunaannya khususnya tempat parkir kendaraan yang belum tertata rapi karena kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh para petugas di terminal, sehingga hal ini berdampak juga pada pengaturan arus lintasan kendaraan.

Daftar Pustaka

- Anwar. (2005). *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Lukow, S. (2013). *Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado*. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 130-142.
- Moleong. (2010). *Metotologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Napir, S., & Junus, D. (2019). *Penguatan Program Prioritas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Gorontalo*. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 34-38. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.15>
- Nasution. (2008). *Implikasi Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Santosa. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: refika ADITAMA.
- Sjafrizal. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tomuka, S. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung*. *Jurnal Eksekutif*, 2(1).
- Wibowo. (2004). *Memahami Good Government Governance dan Good Corporte Governance*. Yogyakarta: YPAPI.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.